

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 1: Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,04	75,68	0,853
2	Angka Kemiskinan	189	173,3	-8,307
3	Angka Pengangguran	6,1	5,85	-4,098
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,21	-4,927
5	Pendapatan Perkapita	11,497	11,998	4,358
6	Ketimpangan Pendapatan	0,37	0,36	-2,703

Sumber Data: BPS Prov. Sulut

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

a. Urusan Pendidikan

- 1) Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	63,36%	60,28%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	76,83%	110,85

- 2) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan
- Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.146.373.411.939,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
- a) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - b) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
- Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a) Pengumpulan data anak tidak sekolah usia 16-18 Tahun (anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dan anak belum pernah bersekolah) sulit di dapatkan *by name by address*
 - b) Pengumpulan data anak tidak sekolah usia 4–18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang tidak sekolah sulit di dapatkan.
 - c) Anggaran yang sedikit.

b. Urusan Kesehatan

- 1) Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2,8405	0,699
2.	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	83,33%	91,23%
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	0	0

- 2) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan
- Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp. 489.700.187.367,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
- a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
- Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a) Rumah Sakit Provinsi masih berstatus Unit Pelaksana Teknis Daerah belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b) Belum terkreditasinya Rumah Sakit Provinsi (Rumah Sakit Khusus Infeksi Kitaway) yang operasional ditahun 2024.
- c) Ketersediaan Anggaran yang belum mencukupi untuk pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit, (anggaran harus disediakan oleh Rumah Sakit).
- d) Tidak tersedianya anggaran untuk monitoring dan evaluasi akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara.
- e) Ketersediaan anggaran di kabupaten/kota untuk yang belum mencukupi/terbatas untuk pelaksanaan program jaminan Kesehatan Nasional (UHC) dan *UHC Cut Off*.
- f) Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk pelaksanaan survey verifikasi tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi (anggaran disediakan oleh Puseksmas melalui DAK Non fisik dan APBD).
- g) Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi akreditasi Puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara.
- h) Pelaksanaan akreditasi klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, Unit Tranfusi Darah (UTD), Tempat Praktik Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, yang baru pada tahap awal pelaksanaan, sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022, tanggal 23 November 2022.
- i) Pemenuhan dokter spesialis di Rumah Sakit belum sesuai dengan standar, hal ini dikarenakan tidak adanya pelamar yang mendaftar walaupun ada formasi PPPK. Selain jenis tenaga medis yang kurang , tenaga medis spesialis cenderung lebih memilih bekerja difasilitas kesehtan milik swasta.
- j) Meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan Lansia sebagai dampak dari meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

c. **Urusan Pekerjaan Umum**

- 1) Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	3,19%	85,76%
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0	34,01%
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	49,46	86,68%
4.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	100
5.	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	100	100
6.	Rasio kemantapan jalan	82,97	83,45
7.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	71,82%	6,55

- 2) Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum
- Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp. 264.512.618.328,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
 - d) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - e) Program Pengembangan Permukiman;
 - f) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - g) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 - h) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - i) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - j) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
- Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a) Kondisi infrastruktur Bina Marga dari segi mutu dan kuantitas yang belum memadai serta adanya penyesuaian panjang jalan dan titik pengenalan pada jalan Provinsi yang mempengaruhi kemantapan jalan Provinsi;
 - b) Luasnya Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yakni 18.302 ha, namun keterbatasan anggaran yang pada program ini sehingga belum dapat

mengakomodasi infrastruktur jaringan irigasi secara keseluruhan.

- c) Penyusunan JAKSTRADA SPAM Provinsi Sulawesi Utara telah 100% pekerjaan selesai, namun adanya keterbatasan anggaran untuk pembangunan fisik pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota (Regional);
- d) Keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah di Provinsi Sulawesi Utara sehingga belum terbangunnya SPAL Regional Lintas Kab/Kota. Namun saat ini RISPAL sudah tersusun;
- e) TPA Regional Ilo-Ilo merupakan TPA Regional dengan sistem Sanitari Landfill, namun Belum Beroperasi karena menunggu proses serah terima dengan BPPW Sulut Kemeterian PUPR;
- f) Dibutuhkannya anggaran yang memadai dalam penyediaan Infrastruktur Permukiman seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah ataupun Tangki Septik Individual.

d. Urusan Perumahan

- 1) Capaian kinerja urusan Perumahan yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	70,92%	0
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
3.	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	0	0
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	100%

- 2) Realisasi Belanja Urusan Perumahan
Realisasi belanja Urusan Perumahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.681.155.081,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
 - a) Program Pengembangan Perumahan;
 - b) Program Kawasan Permukiman;
 - c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk urusan Perumahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan signifikan yang dihadapi.

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
3.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	67%	100%
4.	Persentase penanganan pra bencana	80%	93,33%
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%

- 2) Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp.38.251.156.821,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
- a) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - b) Program Penanggulangan Bencana;
 - c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- a) Penegakan Peraturan Daerah belum optimal;
 - b) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - c) Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan penegakan Perda.

f. Urusan Sosial

- 1) Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7: Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Capaian Kinerja Tahun N-1
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	99,51%
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0	0
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%

- 2) Realisasi Belanja Urusan Sosial
- Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebesar **Rp. 19.722.588.855,-** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:
- a) Program Pemberdayaan Sosial;

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

c) Program Rehabilitasi Sosial;

d) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;

e) Program Penanganan Bencana;

f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 3) Permasalahan Yang Dihadapi
- Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya memiliki 1 Panti Lanjut Usia dan belum memiliki Panti Anak, Panti Disabilitas dan Panti untuk Tuna Sosial sehingga penanganan PMKS dalam panti masih melibatkan panti-panti milik masyarakat. Sedangkan untuk anak sudah terdapat 1 balai pelatihan yang nantinya akan dikembangkan juga menjadi Panti Anak.

b) Pengalokasian anggaran untuk Panti masih terkait dengan Permakanan dan lain-lain yang masih sangat jauh dari standar teknis SPM bidang sosial daerah provinsi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial dalam kaitannya dengan Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa;

c) Panti yang ada belum memenuhi syarat berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial;

d) Masih minimnya pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 1) Hasil EPPD Tahun Sebelumnya
- Belum adanya hasil dari EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022
- 2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
- Berdasarkan Laporan Nomor 1.A/LHP/XIX.MND/04/2024, Provinsi Sulawesi Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Unaudited) Tahun 2024, Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp. 3.653.738.702.955,79** dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mencapai **Rp. 3.707.934.255.582**. Secara rinci, rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8: Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN - LRA	3.965.839.828.596,00	3.653.738.702.955,79	92,13	3.538.185.274.966,21
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	1.635.996.697.596,00	1.520.949.502.951,79	92,97	1.460.744.817.777,21
4.1.1	Pajak Daerah-LRA	1.275.498.222.377,00	1.236.052.643.376,54	96,91	1.186.354.255.171,27
4.1.2	Retribusi Daerah-LRA	256.959.215.233,00	182.904.842.879,66	71,18	171.202.529.811,00

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	70.817.711.445,00	71.762.282.545,00	101,33	70.918.058.953,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	32.721.548.541,00	30.229.734.150,59	92,38	32.269.973.841,94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.328.968.131.000,00	2.131.577.594.004,00	91,52	2.076.188.476.387,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.328.968.131.000,00	2.131.577.594.004,00	91,52	2.076.188.476.387,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan - LRA	2.315.067.912.000,00	2.120.937.395.004,00	91,61	2.042.609.180.387,00
4.2.1.6	Insentif Fiskal - LRA	13.900.219.000,00	10.640.199.000,00	76,55	33.579.296.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.251.980.802,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	875.000.000,00	1.211.606.000,00	138,47	1.251.980.802,00
5	BELANJA	3.958.669.432.277,00	3.707.934.255.582,00	93,67	3.358.663.215.088,00
5 .1	BELANJA OPERASI	2.924.781.100.349,00	2.718.227.555.723,00	92,94	2.331.624.377.273,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.525.063.078.559,00	1.423.903.352.025,00	93,37	1.204.327.865.998,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	929.058.077.066,00	963.384.137.070,00	103,69	906.534.798.730,00
5.1.3	Belanja Bunga	32.309.693.862,00	8.879.864.279,00	27,48	16.194.564.352,00
5.1.4	Belanja Subsidi	7.262.050.000,00	4.324.568.033,00	59,55	13.293.237.126,00
5.1.5	Belanja Hibah	429.871.807.765,00	316.648.289.316,00	73,66	190.226.012.667,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.216.393.097,00	1.087.345.000,00	89,39	1.047.898.400,00
5.2	BELANJA MODAL	445.810.358.954,00	410.830.760.409,00	92,15	423.879.478.944,00
5.2.1	Belanja Tanah	30.300.000.000,00	19.396.472.650,00	64,01	36.218.106.608,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	110.528.418.456,00	95.894.598.497,00	86,76	165.792.109.225,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	176.794.064.397,00	165.608.835.649,00	93,67	110.419.926.917,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.038.002.734,00	107.516.297.364,00	95,96	90.808.712.427,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.944.324.805,00	21.256.903.349,00	142,24	20.640.623.767,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.205.548.562,00	1.157.652.900,00	96,03	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	9.508.656.098,00	450.377.558,00	4,74	371.182.409,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	9.508.656.098,00	450.377.558,00	4,74	371.182.409,00
5.4	BELANJA TRANSFER	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	602.788.176.462,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	597.788.176.462,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	578.569.316.876,00	578.425.561.892,00	99,98	597.788.176.462,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00

KODE AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.170.396.319,00	(54.195.552.626,21)	(755,82)	179.522.059.878,21
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.328.038,68
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253.121.347.253,00	253.119.165.434,89	100,00	230.389.328.038,68
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	260.291.743.572,00	136.790.020.220,00	52,55	156.790.040.664,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	230.291.743.572,00	106.790.020.220,00	46,37	106.790.040.664,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(7.170.396.319,00)	116.329.145.214,89	(1.622,35)	73.599.287.374,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	62.133.592.588,68	0,00	253.121.347.252,89

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Provinsi Sulawesi Utara memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

Tabel 9: Inovasi Yang Dilaporkan Dalam Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

NO	PELAKSANAAN INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	NILAI KEMATANGAN
1	DINAS TENAGA KERJA	PERKASA	76
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET	ASET TERPADU	74
3	DINAS PENDIDIKAN	PPDB ONLINE	69
4	DINAS KEBUDAYAAN	PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA NASI JAHE	64
5	DINAS PARIWISATA	NYONG NONI SULUT	63
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK REAKTIF BERMAKNA	56
7	BIRO EKONOMI	SILOGIKA ODSK (LNTEGRASI DATA LOGISTIK PANGAN SULAWESI UTARA OPTIMALKAN DEMAND DAN SUPPLY KOMODITAS)	54
8	DINAS TENAGA KERJA	SISTEM INFORMASI LAYANAN UJI RIKSA LINGKUNGAN KERJA (SI LURI LINGKE)	54
9	BADAN PERENCANAAN	SULUT SENSANITATIONAL AWARD	52

NO	PELAKSANAAN INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	NILAI KEMATANGAN
	DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
10	BIRO EKONOMI	SIPEDIS (SATU HARGA, PASOKAN, DIST RIBUSI, DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN INFLASI SULUT)	51
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPA PANDE (CEPAT TANGGAP PPNS DALAM PENEGAKAN PERATURAN DI DAERAH)	51
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIM ALISASI PENERIMAAN PAJAK	49
13	DINAS PENANAMAN MODAN DAN PTSP	INOVASI OUTLET DEKAT SARANA KELAUTAN (ODSK) DI KOTA BITUNG	49
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP X MASYARAKAT	BACIRARO RECYCLE	47
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	E-PEGAWAI MOBILE	44
16	RS MATA	SOLID DAN SINERGI MENANGGULANGI KEBUTAAN	41
17	RSUD ODSK	PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK (PSC 119 RSUD ODSK)	41
18	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	MARI JO BAKOBONG	40
19	DIKDA BAPPEDA	TUMOUTOU	36
20	DINAS PENDIDIKAN	APLIKASI SISTEM LNFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDIDIKAN (SIPANDAI)	33
21	DINAS KESEHATAN	ANAK SEHAT ANAK HEBAT (PEDULI STUNTING)	33
22	DINAS PPPA	PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEREMPUAN 4 KRITERIA	32